

DPRDSU: Kejahatan Bermodus Hasil Audit BPK Dimanfaatkan "Meras" Bupati/Wali Kota di Sumut

*** Penegak Hukum Tidak akan Terpengaruh Terhadap Tekanan Massa "Jatuhkan" Bupati dari Jabatannya**

Medan (SIB)

Anggota Komisi A DPRD Sumut Drs H Ahmad Ikhyar Hasibuan menegaskan, saat ini muncul kejahatan baru yang dilakoni kelompok-kelompok tertentu dengan modus menggunakan hasil audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) tuntutan "memeras" Bupati/Wali kota se-Sumut, sehingga sejumlah kepala daerah maupun SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Sumut mengalami keresahan.

"Hasil adut BPK tersebut dimanfaatkan untuk meminta uang para Bupati/Walikota maupun SKPD di Sumut. Jika tidak dilayani, kelompok tersebut tidak segan-segan melakukan aksi unjuk rasa ke kantor-kantor Kejaksaan bahkan ke kantor KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) di Jakarta untuk segera dilakukan pengusutan," ujar Ahmad Ikhyar Hasibuan kepada

wartawan, Senin (17/9) di DPRD Sumut menanggapi modus kelompok tertentu untuk "memeras" para kepala daerah di Sumut.

Yang paling tragis, ujar anggota FP Demokrat ini, hasil audit BPK terhadap APBD tersebut dipolitisasi untuk "memukul" mundur para Bupati/Wali kota maupun SKPD dari jabatannya. Padahal hasil audit tersebut, belum bisa dituduh korupsi, tapi hanya sebagai bahan pertimbangan bagi kepala daerah untuk menyelesaikan persoalan yang bisa merugikan keuangan daerah.

"Sejauh hasil audit BPK bisa diselesaikan oleh Bupati/Wali kota, apakah dengan membayar kerugian keuangan negara atau diperbaiki secara administrasi, sebenarnya tidak ada masalah. Tapi ini tidak, hasil audit itu justru dibawa ke Kejaksaan bersama sejumlah massa. Ini jelas telah terjadi politisasi dan dimanfaatkan untuk men-

jatuhkan Bupati/Wali kota yang belum tentu bersalah," tegas Ikhyar.

Namun Ikhyar yakin, aparat penegak hukum, baik Kejaksaan maupun KPK tidak akan terpengaruh oleh gerakan-gerakan kelompok tertentu untuk membangun opini tidak sehat "menjatuhkan" kredibilitas para Bupati/Wali kota maupun SKPD, sebab para "hamba" hukum itu tahu prosedural hukum dalam melakukan penyelidikan terhadap suatu kasus.

"Kita tahu persis sepak-terjang aparat penegak hukum (baik Kejaksaan maupun KPK), tidak akan sembarangan melakukan pemeriksaan, walaupun ada ancaman dari kelompok tertentu akan mengerahkan massa besar-besaran untuk menuntut hasil audit BPK dituntaskan. Semuanya ada aturannya, bukan asal ada desakan massa terus diusut. Disini kita ajak semua pihak untuk berfikir

normal," tegas Ikhyar.

Berkaitan dengan itu, anggota dewan Dapil Labuhanbatu ini mengajak semua pihak untuk segera menghentikan aksi-aksi "memerasannya" dengan modus hasil audit BPK, sehingga para Bupati/Wali kota maupun SKPD bisa menjalankan tugasnya dengan baik, karena gerakan seperti ini sangat tidak bermartabat, sebab hanya menimbulkan keresahan bagi kepala daerah.

"Lagipula, hasil audit BPK terhadap keuangan Kabupaten/Kota maupun Propinsi hanya sebagai pertimbangan tentang pertanggung-jawaban keuangan yang diserahkan kepada Bupati/Walikota dan DPRD, untuk dijadikan bahan penyelesaian secara administrasi serta membayar kerugian keuangan negara serta tindakan pidana, bukan dipolitisasi dengan memunculkan opini tidak sehat dengan modus pemerasan," tegasnya. (AM)